

**PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGAWASAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi**



OLEH:

DELASMIN MAXON SELAN SAM

2018110093

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Pemerintah harus menggunakan koordinasi organisasi, kontrol sosial, dan pemantauan harian untuk mendapatkan tugas keuangan yang paling maksimal. Berkonsentrasi pada efek penahanan massal, kualitas hidup, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, studi yang dilakukan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini bertujuan untuk menjembatani antara eksekutif dari pemerintah dan masyarakat umum. Permintaan ini dibuat dengan menggunakan metode analitik. Tiga puluh orang tenaga kerja dari Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dipilih sebagai sampel penelitian dengan menggunakan pendekatan complete sampling. Peneliti mengumpulkan informasi melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 25. Menurut penelitian, memiliki latar belakang SDM yang kuat berdampak besar pada akuntabilitas pemantauan keuangan desa, pelibatan masyarakat, komitmen desa, dan tugas pengelolaan keuangan desa. Malang harus transparan mengelola keuangannya untuk membantu pertumbuhan desa.

Kata Kunci: Kinerja, Komitmen Organisasi, Kompetensi SDM, Pemerintah Desa, Pengawasan Partisipasi Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karena desa adalah pusat pertumbuhan, pemerintah federal memiliki keputusan akhir atas keuangan mereka. Perdana (2020) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus benar-benar transparan dan bertanggung jawab. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa karena hal itu biasa dilakukan dan sering dilihat sebagai semacam kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegagalan organisasi atau gagal memenuhi tujuan yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya (Adnyana, 2022).

Tugas pengelolaan keuangan digunakan untuk melaksanakan anggaran desa. Biasanya, tahap administrasi dana desa berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember dan menerapkan APBD untuk satu tahun anggaran. Ilhami dan Widhiastuti (2002) menegaskan bahwa pengelolaan dana desa bertanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, membantu masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dan menangani masalah pembangunan antar desa.

Kapasitas SDM adalah kepribadian seseorang yang menggabungkan pengetahuan, bakat, dan keterampilan mereka di tempat kerja. Kemampuan mengelola keuangan merupakan kebutuhan vital untuk melaksanakan kewajiban desa secara memadai. Kompetensi SDM merupakan komponen atau kebutuhan yang krusial bagi aparatur desa untuk dapat menghasilkan pengelolaan uang desa yang bertanggung jawab. Umaira dan Adnan (2019) menegaskan bahwa memiliki

perangkat desa yang mumpuni dan dapat dipercaya membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Jika ketua desa terlibat dalam penganggaran dan apakah masyarakat dapat memberikan masukan dalam pengelolaan adalah contoh partisipasi masyarakat yang harus dipantau (Umaira dan Adnan, 2019). Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi siapa yang bertugas mengelola keuangan desa. Melibatkan masyarakat umum dalam proses penganggaran dikenal dengan pengawasan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dijelaskan oleh Walyati dan Farida (2020) sebagai proses mengenali peluang dan masalah yang dimiliki oleh masyarakat, memilih solusi yang dapat diterapkan untuk masalah tersebut, mengimplementasikan jawaban tersebut, dan menilai perubahan yang terjadi.

Komitmen organisasi pemerintah desa yang meliputi perangkat desa harus bersih dari korupsi, memiliki etos kerja yang kuat, dan berbakti untuk kemajuan desa dalam rangka mengemban tanggung jawab pengelolaan uang masyarakat. Menurut Ilhami dan Widhiastuti (2022), komitmen organisasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar dukungan Pemdes dan menjunjung tinggi keterbukaan di dalam perusahaannya. Dengan dedikasi organisasi dan akuntabilitas yang tinggi, sumber daya manusia perusahaan dapat beroperasi secara maksimal. Pemerintah kota dengan kekuatan internal dapat mendorong karyawan untuk melakukan banyak pekerjaan, memikul tanggung jawab nyata atas tindakan mereka, dan bekerja menuju tujuan asosiasi (Mada et al., 2017).

Pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan salah satu dari

empat syarat laporan keuangan yang dinilai sangat baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan yang merupakan kriteria terpenting. Mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat dipercaya Informasi yang relevan didefinisikan sebagai memiliki kualitas berikut: menawarkan umpan balik, tepat waktu, dan memiliki nilai prediktif. Laporan keuangan tidak, paling tidak, menyertakan ketidakakuratan yang signifikan atau informasi yang menyesatkan. Laporan keuangan lebih bermanfaat daripada laporan tahun sebelumnya karena dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat memahami angka-angka keuangan dan bagaimana mereka disajikan agar dianggap "mudah dipahami."

Proyek studi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM, Kontrol Masyarakat Pengawasan, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dilaksanakan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Untuk mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini mencoba memahami nilai penilaian keterlibatan masyarakat, peran kompetensi SDM, dan komitmen organisasi.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ditemukan menggunakan latar belakang pengetahuan ini.

1. Apakah tanggung jawab pengelolaan keuangan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang bergantung pada kompetensi SDM?
2. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dikhawatirkan adanya keterlibatan masyarakat?

3. Apakah tugas pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang berubah akibat komitmen pemerintah desa?
4. Sumber daya manusia, penjangkauan masyarakat, dan organisasi pemerintah yang berkomitmen seperti apa yang ada di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dalam hal kemampuan untuk mentransfer uang lintas desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, untuk mengkaji pengaruh keterampilan SDM masyarakat dalam mengelola anggaran masyarakat.
2. untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepekaan masyarakat terhadap tugas pengelolaan uang desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Untuk menilai bagaimana tanggung jawab pemerintah kota untuk mengelola dana kota akan mempengaruhi Kota Mulyoagung, Daerah Dau, Rezim Malang.
4. Untuk mengetahui hubungan antara komitmen organisasi, kontrol atas pelibatan masyarakat, dan kompetensi sumber daya manusia di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang pemerintah desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa

Mungkin menghargai pentingnya pengetahuan SDM dalam melacak keterlibatan masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan uang lokal.

2. Bagi Pihak Akademik

Kesimpulan penelitian dapat dimanfaatkan di kelas sebagai kumpulan kontribusi sastra dan intelektual.

3. Bagi Instansi

Informasi yang akan berguna untuk pengembangan kelembagaan di masa mendatang harus disediakan untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan uang desa.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Kami mengantisipasi bahwa penelitian kami akan bermanfaat bagi peneliti lain, terutama mereka yang bekerja di bidang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I Gede Putra (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Vol. 11, No. 3. Hal : 48-61*
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 25 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Halim, A. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha (2018) *Kompetensi Plus : Teori, Desain,. Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ilhami M., dan Widhiastuti R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 10, No. 2, Hal: 185-198*
- Kasmini K.L.S. dan Dewi N.A.W.T., (2021). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng Barat). *Jurnal Akuntansi Profesi Volume 12 Nomor 02. Hal. 420-430*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2016). Pelaporan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Desa Sejahtera. <https://www.ksap.org/sap/pelaporan-keuangan-desa-untuk-mewujudkan-desa-sejahtera/>.
- Kuntjoro (2012) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rajawali.
- Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi Dan. Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta : Gramedia
- Luthans, Fred. (2015). *Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh*. Yogyakarta : Penerbit.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , Dan

- Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Vol. 2, No. 3. Hal 106–115.*
- Mursyidi. (2013). *Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Muslimin. (2012). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Ciputat: Nadi Pustaka.
- Naimah. (2017). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa. Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Dipublikasikan.
- Perdana, Khaeril Wahyu (2020). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi Vol. 4, No. 3. Hal. 1-25.*
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20 – 38
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar.
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Sopiah. (2018). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan kompetensi SDM. Kedua*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Umaira, Siti dan Adnan (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 3, Halaman 471-481*
- Walyati, Fifit Nur dan Farida. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*.
- Wasistiono, Sadu. (2016). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.